



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN ANGGARAN 2020

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat terhadap peran pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan. Kemajuan teknologi, informasi dan kedewasaan masyarakat di era saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan hal tersebut sebagai modal pencapaian peran pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan bersih (*clean goverment*) di Kabupaten Karanganyar, perlu ditopang dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan lancar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Manajemen pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan suatu proses dari siklus kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, karena suatu proses maka kegiatan yang dilakukan tidak ada akhirnya, secara berkesinambungan proses tersebut harus mengarah kepada semakin dekatnya pencapaian tujuan yaitu terwujudnya Kabupaten Karanganyar yang sejahtera.

Inspektorat Kabupaten Karanganyar melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan mempunyai peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil-hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Karanganyar berperan sebagai umpan balik dalam penyusunan perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan agar tujuan dapat dicapai secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah berfungsi memberikan jasa kegiatan yang bersifat *early warning system* (peringatan dini), konsultasi, dan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan.

Dengan berjalannya peran dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar, perlu didukung jalinan komunikasi dengan baik antara Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan OPD lain di Kabupaten Karanganyar, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Karanganyar, melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
4. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
5. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2020.

Tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk :

1. Memberikan informasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemeritah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

Visi Inspektorat Kabupaten Karanganyar **“Menjadi Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional Menuju Karanganyar yang Tangguh”**.

Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu mengacu pada Visi tersebut maka disusunlah Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pengawasan yang Berkualitas, Handal dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tercapainya Pemerintahan yang Baik;
3. Melaksanakan Koordinasi dan atau Konsultasi Pengawasan Menuju Pengawasan yang Lebih Sinergis;
4. Melaksanakan Pemantauan Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pengawasan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kabupaten Karanganyar merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Prioritas kegiatannya antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Inventarisasi temuan pengawasan
5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
7. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/tematik
8. Pelaksanaan LARWASDA
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
11. Peningkatan Kapabilitas APIP
12. Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
13. Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi
14. LHKPN dan LHKASN
15. Fasilitasi Korpsugah dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi
16. Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas
17. Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan
18. Review Dokumen Perencanaan
19. Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa serta

DAK

20. Review Laporan Keuangan Daerah
21. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP
22. Koordinasi APIP dan APH
23. Saber Pungli

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar No. 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kabupaten Karanganyar yaitu membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. *STANDARD OPERATING PROSCEDURE (SOP)* INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menetapkan SOP guna mencapai tujuan tugas dengan efektif dan efisien. SOP tersebut ditetapkan dalam Keputusan Inspektorat Kabupaten Karanganyar No. 900/35/2013 Tentang SOP dan Prosedur Pemeriksaan yang terdiri dari SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat, SOP Inspektorat Pemeriksaan Khusus, SOP Pemeriksaan Reguler, SOP Inspektorat Pemeriksaan Tujuan Tertentu, dan SOP Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.

D. PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/500 Tahun 2018 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2019.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor Adapun Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut pada lampiran 1.

D. KEPEGAWAIAN

Tabel 2.1 DAFTAR PEGAWAI INSPEKTORAT

NO	NAMA	NIP	Status	PANGKAT/GOL
1	Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.	19610504 198903 1 006	PNS	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	CHRISTIANI NURENDAH WIDYAWATI, S.H., M.M.	19630427 199003 2 002	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
3	NUGROHO, S.Sos., M.Hum.	19680705 199001 1 001	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
4	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H,MM	19680604 199503 2 003	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
5	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M.	19700205 199101 1 002	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
6	FATKUL MUNIR, SKM,M.Kes	19630812 198611 1 002	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
7	Dra. DYAH MUSTIKAWATI, MM	19611122 199103 2 002	PNS	Pembina Utama Muda (IV/c)
8	SUPRIYONO, S.H, M.Hum	19610621 198607 1 002	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
9	HENI KUSTYAWATI, S.H, MM	19680520 199403 2 009	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
10	RETNO RINAWATI, S.H, MM	19680131 199603 2 003	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
11	TRI WULAN AJI, S. Sos, MM	19660503 199803 2 003	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
12	Dra. SUNARMI, MM	19660316 199803 2 005	PNS	Pembina (IV/a)
13	BUDI RAHARJO, S.Sos	19601126 198303 1 016	PNS	Pembina (IV/a)
14	Ir. SUHUD, MM	19601001 199802 1 001	PNS	Pembina (IV/a)
15	KRISTANTO HARI P, S.E, Ak, MSi	19600703 198503 1 007	PNS	Pembina (IV/a)
16	RAHDRIAWATI, S.IP	19670320 198901 2 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
17	HARTUTI, S.E	19661224 199303 2 007	PNS	Pembina (IV/a)
18	ENDANG SRI SUHARTI, S.E	19660416 199803 2 001	PNS	Pembina (IV/a)
19	ENDANG SRI SUSILANINGSIH, S.E	19621110 198503 2 011	PNS	Pembina (IV/a)
20	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, ST, MM	19740624 200312 1 004	PNS	Pembina (IV/a)
21	RATNA FATMAWATI, SE,M.Si, Ak	19791015 200804 2 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
22	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos	19650430 198603 2 011	PNS	Pembina (IV/a)
23	MULYATI, SE, M.Acc	19740810 199903 2 006	PNS	Pembina (IV/a)
24	BASRI SETYOWATI, S.Sos	19680521 199312 2 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)

25	AHMAD CHOIRUDIN, S.H	19760822 200604 1 004	PNS	Penata (III/c)
26	C. ANDI MURTOPO, S.Sos	19781217 199803 1 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
27	FAJAR AMIEN, ST, M.Si	19790123 200801 1 008	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
28	INNAHA RAHMAWATI, SE, M.Si	19771211 200902 2 001	PNS	Penata (III/c)
29	MUHAMAT YUSUP, SE, M.Si	19830807 200902 1 003	PNS	Penata (III/c)
30	CICUK DWI HANDOKO, SE, M. Si	19830524 200902 1 004	PNS	Penata (III/c)
31	WAHYUNINGSIH, SH	19760710 201001 2 022	PNS	Penata (III/c)
32	AGUNG BUDIYARTO, SH	19770101 201001 1 023	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
33	PRIYANTO HARTO NUGROHO, SE	19780118 201001 1 010	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
34	SHINTA KUSUMA DEWI, SH	19841030 201001 2 027	PNS	Penata (III/c)
35	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, SH	19851021 201001 1 011	PNS	Penata Muda Tingka I (III/b)
36	ARTTIKA RAHMA SARI, SE	19841204 201101 2 016	PNS	Penata (III/c)
37	SUPRAYITNO, ST	19770420 201101 1 003	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
38	AGUS HARMANTO, SE, M. Si	19840411 200604 1 004	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
39	RISKHA AMALLIA I, SH, M.Si	19801109 201001 2 013	PNS	Penata (III/c)
40	SURYA AFRIZAL, SH,MM	19830424 201001 1 030	PNS	Penata (III/c)
41	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, SH	19821118 201001 1 022	PNS	Penata (III/c)
42	DEWI SURYANINGSIH, SH	19781208 201001 2 014	PNS	Penata (III/c)
43	RETNO WULANDARI, SH	19860304 201001 2 032	PNS	Penata (III/c)
44	MIYA SUNDARI, SH	19841214 201001 2 026	PNS	Penata (III/c)
45	ATIK RAHMAWATI, SH	19770831 201001 2 011	PNS	Penata (III/c)
46	NANDIKA SARI WIDATA, SH,MH	19870819 201012 2 006	PNS	Penata (III/c)
47	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, SE	19790625 201101 1 004	PNS	Penata Muda (III/a)
48	FAUZY HENDRO PURNOMO, SE	19860610 201101 1 012	PNS	Penata Muda (III/a)
49	JAKA MARYANTO, SH	19731117 200906 1 001	PNS	Penata Muda (III/a)
50	BASMAN	19651222 201001 1 001	PNS	Pengatur (II/c)
51	PURWADI	19771126 201001 1 002	PNS	Pengatur (II/c)

52	SUGIYONO	19730326 200701 1 021	PNS	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
53	BANGKIT DWI NUGROHO, SH	-	Tenaga Kontrak	Pengadministrasi
54	AGUS SUPRAPTO, SE	-	Tenaga Kontrak	Caraka
55	ANGGIT APRILIA PAMUNGKAS	-	Tenaga Kontrak	Pengemudi
56	ADITYATAMA MACHRIAN NURHADI	-	Tenaga Kontrak	Penjaga Malam

2.2 DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL INSPEKTORAT YANG TERISI

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1.	Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.	Inspektur	Memenuhi	Memenuhi
2.	CHRISTIANI NURENDAH WIDYAWATI, S.H., M.M.	Sekretaris	Memenuhi	Memenuhi
3.	NUGROHO, S.Sos., M.Hum.	Inspektur Pembantu Wil. I	Memenuhi	Memenuhi
4.	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H ,MM	Inspektur Pembantu Wil II	Memenuhi	Memenuhi
5.	Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M.	Inspektur Pembantu Wil. III	-	-
6.	FATKUL MUNIR, SKM,M.Kes	Inspektur Pembantu Wil IV	Memenuhi	Memenuhi
7.	RATNA FATMAWATI, SE,M.Si, Ak	Kasubbag Adm. dan Umum	Memenuhi	Memenuhi
8.	Dra. SUNARMI, MM	Kasubag Perencanaan	Memenuhi	Memenuhi
9.	SRIDANARTO LATNOKUSUMO, ST, MM	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Memenuhi	Memenuhi

2.3 DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUS

N O	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	Dra. DYAH MUSTIKAWATI, MM	19611122 199103 2 002	P2UPD Madya
2.	SUPRIYONO, S.H, M.Hum	19610621 198607 1 002	P2UPD Madya
3.	HENI KUSTYAWATI, S.H, MM	19680520 199403 2 009	P2UPD Madya
4.	RETNO RINAWATI, S.H, MM	19680131 199603 2 003	Auditor Madya
5.	MULYATI, SE, M.Acc	19740810 199903 2 006	Auditor Madya
6.	TRI WULAN AJI, S. Sos, MM	19660503 199803 2 003	Auditor Kepegawaian Madya
7.	BUDI RAHARJO, S.Sos	19601126 198303 1 016	P2UPD Madya
8.	Ir. SUHUD, MM	19601001 199802 1 001	P2UPD Madya
9.	RAHDRIAWATI, S.IP	19670320 198901 2 001	Auditor Kepegawaian Muda

10.	HARTUTI, S.E	19661224 199303 2 007	P2UPD Muda
11.	ENDANG SRI SUHARTI, S.E	19660416 199803 2 001	Auditor Muda
12.	ENDANG SRI SUSILANINGSIH, S.E	19621110 198503 2 011	Auditor Muda
13.	SUTRISNO SRI HUDOYO, S.Sos, MM	19670913 199402 1 001	Auditor Ahli Muda
14.	ENI SETIYANINGSIH, S.Sos	19650430 198603 2 011	Auditor Muda
15.	KATIYO, S.Sos	19620203 198503 1 015	P2UPD Muda
16.	BASRI SETYOWATI, S.Sos	19680521 199312 2 001	P2UPD Muda
17.	AHMAD CHOIRUDIN, S.H	19760822 200604 1 004	P2UPD Muda
18.	C. ANDI MURTOPO, S.Sos	19781217 199803 1 002	P2UPD Muda
19.	INNAHA RAHMAWATI, SE, M.Si	19771211 200902 2 001	Auditor Pertama
20.	MUHAMAT YUSUP, SE, M.Si	19830807 200902 1 003	Auditor Pertama
21.	WAHYUNINGSIH, SH	19760710 201001 2 022	Auditor Kepegawaian Pertama
22.	AGUNG BUDIYARTO, SH	19770101 201001 1 023	Auditor Pertama
23.	PRIYANTO HARTO NUGROHO, SE	19780118 201001 1 010	Auditor Pertama
24.	SHINTA KUSUMA DEWI, SH	19841030 201001 2 027	Auditor Pertama
25.	TRI NUGROHO PAMUNGKAS, SH	19851021 201001 1 011	Auditor Pertama
26.	ARTTIKA RAHMA SARI, SE	19841204 201101 2 016	Auditor Pertama
27.	SUPRAYITNO, ST	19770420 201101 1 003	Auditor Pertama

2.4. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL UMUM

N O	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3	4
1.	FAJAR AMIEN, ST	19790123 200801 1 008	Pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	ATIK RAHMAWATI, SH	19770831 201001 2 011	Calon Auditor
3.	DEWI SURYANINGSIH, SH	19781208 201001 2 014	Calon Auditor
4.	AGUS SUMARLI, SH	19800520 201001 1 025	Calon Auditor
5.	RISKHA AMALIA INDRIAWATI, SH	19801109 201001 2 013	Calon Auditor
6.	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, SH	19821118 201001 1 022	Calon Auditor
7.	SURYA AFRIZAL, SH, MM	19830424 201001 1 030	Calon Auditor
8.	MIYA SUNDARI, SH	19841214 201001 2 026	Calon Auditor
9.	RETNO WULANDARI, SH	19860304 201001 2 032	Calon Auditor
10.	CICUK DWI HANDOKO, SE	19830524 200902 1 004	Calon Auditor
11.	AGUS HARMANTO, SE	19840411 200604 1 004	Calon Auditor
12.	WAHYU WIBOWO, S.STP	19911116 201406 1 002	Pengolah Data LHP dan Pengaduan
13.	DANANG IFTIAN PRIHANTORO, A.Md	19790625 201101 1 004	Pengadministrasi Keuangan
14.	FAUZY HENDRO PURNOMO, A. Md	19860610 201101 1 012	Pengolah Data LHP dan Pengaduan
15.	JAKA MARYANTO	19731117 200906 1 001	Pengolah Data LHP dan Pengaduan
16.	BASMAN	19651222 201001 1 001	Pramu Kantor
17.	PURWADI	19771126 201001 1 002	Pengemudi
18.	SUGIYONO	19730326 200701 1 021	Satuan Pengamanan Kantor
19.	BANGKIT DWI NUGROHO, SH	-	Pengemudi
20.	AGUS SUPRAPTO, SE	-	Pengadministrasi
21.	ANGGIT APRILIYA PAMUNGKAS	-	Pengemudi
22.	ADITYATAMA MACHRIAN NURHADI	-	Tenaga Kontrak

BAB III

GARIS BESAR PROGRAM KERJA

A. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program di Inspektorat Kabupaten Karanganyar agar didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada setiap sektor tercapai secara maksimal dengan dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d) Penyediaan alat tulis kantor
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h) Penyediaan bahan logistik kantor
 - i) Penyediaan makanan dan minuman
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k) Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c) Pengadaan mebeleur

- d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- a) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP
 - b) Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
 - c) Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional
 - d) Penyusunan Renstra OPD Tahun 2018-2023
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a) Review Laporan Keuangan Daerah
 - b) Review Dokumen Perencanaan
 - c) Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
- a) Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala dan audit kinerja
 - b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
 - d) Inventarisasi temuan pengawasan
 - e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - f) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
 - g) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/ Tematik/PDTT
 - h) Pelaksanaan LARWASDA

- i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
 - j) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
 - k) Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
 - l) Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar
 - m) Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara
 - n) Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi
 - o) Pendampingan dan fasilitasi audit LKPD
 - p) Fasilitasi Korpsugah dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
 - q) Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas
 - r) Koordinasi APIP dan APH
 - s) Fasilitasi Whistle blowing system dan konflik kepentingan
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - b) Pelaksanaan PKS / Ekspose
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- a) Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- a) Pengelolaan / pemeliharaan Website

B. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Januari s/d Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran 2019

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	826.535.000	727.428.247,00	88,01
1	Penyediaan jasa surat menyurat	19.092.000,00	17.941.964,00	93,98
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.800.000,00	124.404.700,00	92,98
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	172.427.500,00	151.258.909,00	87,72
4	Penyediaan alat tulis kantor	86.705.000,00	85.815.000,00	98,97
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.002.000,00	57.581.200,00	95,97
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.888.500,00	15.849.250,00	99,75
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.520.000,00	2.310.000,00	91,67
8	Penyediaan bahan logistik kantor	23.000.000,00	22.706.000,00	98,72
9	Penyediaan makanan dan minuman	79.700.000,00	78.000.000,00	97,87
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	164.000.000,00	107.341.224,00	65,45
11	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	12.500.000,00	10.820.000,00	86,56
12	Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan	56.900.000,00	53.400.000,00	
II	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	97.082.000,00	83.440.605,00	85,95
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.700.000,00	12.875.505,00	87,59
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.600.000,00	24.385.050,00	85,26
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.622.000,00	19.665.050,00	83,25
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.160.000,00	26.515.000,00	87,91
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.797.000,00	32.868.619,00	91,82
1	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	10.914.000,00	10.888.369,00	99,77
2	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	4.890.000,00	4.890.000,00	100,00
3	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	10.085.500,00	8.932.750,00	88,57
4	Penyusunan Renstra OPD Tahun 2018-2023	9.907.500,00	8.157.500,00	82,34
IV	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	75.652.000,00	55.836.975,00	73,81
1	Review Laporan Keuangan Daerah	10.652.000,00	10.652.000,00	100,00
2	Review RKA SKPD	40.000.000,00	30.724.000,00	76,81
3	Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan dana desa	25.000.000,00	14.460.975,00	57,84
V	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.452.074.400,00	1.114.030.399,00	76,72
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala dan audit kinerja	457.775.000,00	387.175.000,00	84,58
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (saksi di pengadilan)	50.330.000,00	19.340.000,00	38,43
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	25.000.000,00	2.575.000,00	10,30
4	Inventarisasi temuan pengawasan	5.883.000,00	5.883.000,00	100,00
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	105.837.500,00	90.322.423,00	85,34
6	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	37.500.000,00	33.297.743,00	88,79
7	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus dan tematik	99.824.400,00	68.409.400,00	68,53

1	2	3	4	5
8	Pelaksanaan LARWASDA	47.257.000,00	19.014.500,00	40,24
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	40.000.000,00	38.280.000,00	95,70
10	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	125.117.500,00	103.274.507,00	82,54
11	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	25.600.000,00	18.860.274,00	73,67
12	Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	7.200.000,00	2.169.750,00	30,14
13	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	75.130.000,00	72.253.420,00	96,17
14	Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	44.320.000,00	44.031.250,00	99,35
15	Fasilitasi Korpsugah dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	274.850.000,00	204.194.132,00	74,29
16	Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	21.950.000,00	3.150.000,00	14,35
17	Fasilitasi Whistle blowing system dan konflik kepentingan	8.500.000,00	1.800.000,00	21,18
VI	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	225.126.100,00	219.963.709,00	97,71
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	195.126.100,00	194.013.709,00	99,43
2	Pelaksanaan PKS / Ekspose	30.000.000,00	25.950.000,00	86,50
VII	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	9.907.500,00	9.327.250,00	94,14
1	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	9.907.500,00	9.327.250,00	94,14
VIII	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	10.800.000,00	10.636.000,00	98,48
1	Pengelolaan/Pemeliharaan Website	10.800.000,00	10.636.000,00	98,48
	JUMLAH	2.732.974.000,00	2.253.531.804,00	82,46

Dari total anggaran di Tahun 2019 sebesar Rp. 2.732.974.000,00 sampai tanggal 30 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 2.253.531.804,00 atau sebesar 82,46 %, sehingga sisa anggaran yang tersedia sebesar Rp. 479.442.196,00.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN URUSAN DESENTRALISASI

A. Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Karanganyar

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target Kinerja Terselenggaranya pengadaan benda pos 500 buah dan BBM Kurir dan capaian kinerja dan capaian kinerja tersedianya 222 benda pos dan meterai, jasa kurir selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp. 19.092.000,00 Realisasi Anggaran Rp. 17.941.964,00 (93,98%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 1.150.036,00.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya jasa pelayanan komunikasi sumber daya air, listrik, telpon dan internet (4 Sumber) terpenuhi selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 133.800.000,00 Realisasi Anggaran Rp. 124.404.700,00 (92,98%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 9.395.300,00.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 11 kendaraan roda 4 dan 13 roda 2 yang terdiri dari jasa service, sparepart, BBM dan pajak kendaraan (100%). Anggaran Rp. 172.427.500,00 realisasi Anggaran Rp. 151.258.909,00 (87,72%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 21.168.591,00.

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 1 Paket demi terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kantor selama 12 (100%). Anggaran Rp. 86.705.000,00 Realisasi Anggaran Rp. 85.815.000,00 (98,97%). selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 890.000,00.

e. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Target kinerja dan capaian Kinerja tersedianya 1 paket cetakan, 129.000 lembar penggandaan dan 900 eksemplar penjiilidan (100%). Anggaran Rp. 60.002.000,00 Realisasi Anggaran Rp. 57.581.200,00 (95,97%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 2.420.000,00.

f. **Penyediaan peralatan rumah tangga**

Target Kinerja dan capaian 1 paket kebutuhan rumah tangga kantor, 2 Refil APAR, dan 12 Retribusi Sampah selama 12 bulan tercapai (100%). Anggaran Rp. 15.888.500,00 realisasi Anggaran Rp. 15.849.250,00 (99,75%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 39.250,00

g. **Pengadaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan**

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya buku bacaan 2 surat kabar 12 bulan (100%). Anggaran Rp. 2.520.000,00 dan realisasi Rp. 2.310.000,00 (91,67%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 210.000,00

h. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 1 paket bahan logistik kantor 1.468 dos/kg/buah, Gas LPG Refil 24 kali, Refil Aqua 96 galon selama 12 bulan capaian (100%). Anggaran Rp. 23.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 22.706.000,00 (90,20%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 294.000,00.

i. **Penyediaan Makanan Dan Minuman**

Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1594 paket makan dan minum rapat, sosialisasi, bintek dan tamu capaian 1.560 (98%). Anggaran Rp. 79.700.000,00 realisasi anggaran Rp. 78.000.000,00 (97,87%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 1.700.000,00.

j. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam/luar daerah**

Target Kinerja kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan selama 12 bulan tercapai 100%. Anggaran Rp. 164.000.000,00 realisasi anggaran

Rp. 107.341.224,00 (65,45%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 56.658.776,00.

Permasalahan :

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi telah dilaksanakan 100% sehingga telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 56.658.776,00

k. **Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/ Dokumen Daerah**

Target Kinerja dan capaian kinerja tertata dan lebih tertibnya pengamanan arsip rahasia selama 12 bulan tercapai 100%. Anggaran dan realisasi anggaran Rp. 12.500.000,00 realisasi anggaran Rp. 10.820.000,00 (86,56%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 1.680.000,00.

l. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Target Kinerja dan capaian kinerja tertata dan lebih tertibnya pengamanan arsip rahasia selama 12 bulan tercapai 100%. Anggaran dan realisasi anggaran Rp. 56.900.000,00 realisasi anggaran Rp. 53.400.000,00 (93,85%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 3.500.000,00.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

a. **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**

Target Kinerja dan capaian kinerja Tersedianya 1 unit mesin potong rumput, 1 unit UPS dan pekerjaan tambah daya tercapai 100%. Anggaran Rp. 14.700.000,00 realisasi anggaran Rp. 12.875.505,00 (87,59%), Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 1.824.495,00.

b. **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor**

Target Kinerja tercapainya dan capaian kinerja 1 pekerjaan Terpeliharanya gedung, jaringan listrik, dan pengadaan gerobak sorong tercapai 100%. Anggaran Rp. 28.600.000,00 Realisasi Anggaran Rp. 24.385.050,00 (85,26%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 4.214.950,00

- c. **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**
 Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung dan kantor dan kebutuhan alat listrik 1 paket, capaian 100%. Selisih capaian dengan target anggaran Rp. 23.622.000,00 realisasi anggaran Rp. 19.665.050,00 (83,25%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 3.956.950,00.
 - f. **Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor**
 Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 paket tercapai 100%. Anggaran Rp. 30.160.000,00 realisasi anggaran Rp. 26.515.000,00 (87,91%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 3.645.000,00.
- 3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. **Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional**
 Target dan capaian Kinerjanya 35 Penilaian Angka Kredit bagi PFA tahun 2017 (100%). Anggaran Rp. 10.914.000,00 realisasi Rp. 10.888.369,00 (99,77%) Selisih anggaran dan realisasi Rp. 25.631,00.
 - b. **Pelaksanaan Evaluasi LAKIP**
 Target Kinerja dan capaian kinerja 14 LHE LAKIP 2016 dan 1 Rekomendasi capaian (100%). Anggaran dan realisasi tercapai Rp. 4.890.000,00 (100%).
 - c. **Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD**
 Target Kinerja dan capaian kinerja terwujudnya penyelesaian pengelolaan keuangan SKPD 12 laporan keuangan dan realisasi kegiatan, RKA, RKAP, DPA, DPPA tercapai 100%. Anggaran Rp. 10.085.500,00 dan realisasi anggaran Rp. 8.932.750,00 (88,57%). Selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp. 1.152.750,00.
- 4. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - a. **Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
 Target kinerja dan capaian kinerja adalah 1 Laporan hasil review laporan keuangan Daerah Tahun 2019 capaian 100%. Anggaran dan realisasi anggaran Rp. 10.652.000,00 (100%).

b. **Review RKA SKPD**

Target kinerja kinerja adalah terlaksananya review Dokumen Perencanaan SKPD dan PPKD Tahun 2019 dan capaian kinerja terlaksananya review Dokumen Perencanaan SKPD - PPKD Tahun 2019 capaian 100 %. Anggaran Rp. 40.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 30.724.000,00 (76,81%). Selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp. 9.276.000,00.

c. **Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan dana desa**

Target kinerja kinerja adalah terlaksananya review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan dana desa Tahun 2019 dan capaian kinerja terlaksananya review proses pengadaan barang dan reuiu pengelolaan dana desa Tahun 2019 adalah 3 LHR dengan capaian 2 LHR (66,7%). Anggaran Rp. 25.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 14.460.975,00 (57,84 %). Selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp. 9.276.000,00.

Permasalahan :

Kegiatan Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan dana desa telah dilakukan dan terbit 2 LHR terdiri dari 1 LHR pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan 1 LHR Dana Desa, 1 LHR yang belum terlaksana karena belum perlu dilakukan reuiu.

5. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.**

a. **Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Reguler/ Berkala**

Target kinerja kinerja adalah terlaksananya pemeriksaan 80 obrik dan capaian kinerja 100 %. Anggaran Rp. 457.775.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 387.175.000,00 (84,58%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp. 70.600.000,00.

b. **Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah**

Target Kinerja prosentasi aduan yang ditindaklanjuti 100% Anggaran Rp. 50.330.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 19.340.000,00

(38,43%) jadi selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp 30.990.000,00.

Permasalahan :

Perhitungan serapan anggaran sedikit karena penghitungan capaian kinerja untuk kegiatan tersebut adalah semakin sedikit kasus aduan yang masuk berarti pengendalian internal dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh objek pemeriksaan semakin baik, walaupun dari sisi penyerapan anggaran capaian persentasenya sedikit.

c. **Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Target Kinerja terlaksananya kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala daerah sebanyak 10 kajian, tercapaian 10 laporan hasil kajian atau capaian kinerja 100 %. Anggaran Rp. 25.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 2.575.000,00 (10,30%) jadi selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp 22.425.000,00.

Permasalahan :

Telah dilakukan efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum

d. **Inventarisasi Temuan Pengawasan**

Target kinerja dan capaian kinerja terinventarisasinya temuan hasil pengawasan dari aparat pengawasan baik intern maupun ekstern selama 12 bulan capaian 100 %. Anggaran dan realisasi anggaran Rp. 5.883.000,00 (100%).

e. **Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**

Target kinerja dan capaian kinerja terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 90% dari rekomendasi temuan dengan 6 Laporan pelaksanaannya dan terlaksananya Rakorwas capaian 100%. Anggaran Rp. 105.837.500,00 realisasi anggaran Rp. 90.322.423,00 (85,34%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 15.515.077,00.

f. **Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif**

Target kinerja terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan dan capaian kinerja terselenggaranya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan capaian 100%. Anggaran Rp. 37.500.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 33.297.743,00 (88,79%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 4.202.257,00.

g. **Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus**

Target prosentase tindaklanjut penugasan pemeriksaan khusus. Capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan khusus 100 % penugasan telah. Anggaran Rp. 99.824.400,00 realisasi anggaran Rp. 68.409.400,00 (68,53%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 31.415.000,00.

Permasalahan :

Perhitungan serapan anggaran sedikit karena penghitungan capaian kinerja untuk kegiatan tersebut adalah semakin sedikit penugasan pemeriksaan khusus berarti pengendalian internal dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh objek pemeriksaan semakin baik, walaupun dari sisi penyerapan anggaran capaian prosentasenya sedikit.

h. **Pelaksanaan LARWASDA**

Target Kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 1 kali kegiatan LARWASDA tercapai 100%. Anggaran Rp. 47.257.000,00 dan realisasi anggaran Rp. 19.014.500,00 (40,24 %) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 28.242.500,00.

Permasalahan :

Kegiatan Larwasda dilakukan dengan efektif dan efisien yang menghadirkan Orbrik saja dengan tetap tercapainya tujuan kegiatan.

i. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa**

Target Kinerja dan capaian kinerja meningkatnya kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan dengan output 16 laporan hasil monitoring 100 %. Anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi anggaran Rp 38.280.000,00 (95,70%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 1.720.000,00.

j. **Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)**

Target Kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP tercapai 100%. Anggaran Rp. 125.117.500,00 realisasi anggaran Rp. 103.274.507,00 (82,54%) jadi selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp. 21.842.993,00

k. **Pelaksanaan Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi**

Target Kinerja terlaksananya penerapan reformasi birokrasi 10 SKPD asesor capaian kinerja 100 %. Anggaran Rp. 25.600.000,00 realisasi anggaran 18.860.274,00 (73,67 %) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp. 6.739.726,00

l. **Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi**

Target kinerja prosentase gratifikasi yang dilaporkan capaian 100%. Anggaran Rp. 7.200.000,00 realisasi anggaran Rp. 2.169.750,00 (30,14%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 5.030.250,00.

Permasalahan :

Pada tahun 2019 tidak terdapat pelaporan Gratifikasi yang masuk ke Inspektorat. Anggaran digunakan untuk melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi.

n. **Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar**

Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya koordinasi pelaporan LHKPN dan sosialisasi e-LHKPN kepada pejabat untuk eselon IV tercapai 100 %. Anggaran Rp. 75.130.000,00 realisasi anggaran Rp. 72.253.420,00 (96,17%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 2.876.580,00.

o. **Pelaksanaan LHKASN Bagi Aparatur Sipil Negara**

Target kinerja terlaporkannya 97% LHKASN dan capaian kinerja LHKASN 97% terlaporkan sehingga realisasi kinerja 97%. Anggaran Rp. 44.320.000,00 realisasi anggaran Rp. 44.031.250,00 (99,35%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 288.750,00

p. **Fasilitasi Korsupgah**

Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya target rencana aksi 2019 dan terlaksananya Roadshow Bus KPK di Kabupaten

Karanganyar tercapai 100 %. Anggaran Rp. 274.850.000,00 realisasi anggaran Rp. 204.194.132,00 (74,29%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 70.655.868,00

q. **Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas**

Target kinerja dan capaian kinerja Terpilihnya satu OPD sebagai pilot project Zona Integritas tercapai 100 %. Anggaran Rp. 21.950.000,00 realisasi anggaran Rp. 3.150.000,00 (14,35%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 18.800.000,00

Permasalahan :

Pelaksanaan Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas dilakukan dengan melakukan pendampingan implementasi Zona Integritas pada Rumah Sakit Daerah dan Disdukcapil. Telah dilakukan efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum.

r. **Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan**

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan tercapai 100 %. Anggaran Rp. 8.500.000,00 realisasi anggaran Rp. 1.800.000,00 (21,18%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 6.700.000,00.

Permasalahan :

Efisiensi pada belanja narasumber

Solusi :

Pencermatan kembali pada tahap perencanaan untuk tahun anggaran berikutnya

6. **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.**

a. **Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Target Kinerja terselenggarannya pelatihan dan pengembangan pengetahuan APIP selama 12 bulan capaian 100%. Anggaran Rp. 195.125.100,00 Realisasi Anggaran Rp. 194.013.709,00 (99,43%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp 1.111.391,00.

b. **Pelaksanaan PKS/Ekspose**

Target Kinerja terlaksananya 10 kali pelatihan di kantor sendiri, tercapian 9 kali pelatihan atau 90%. Anggaran Rp. 30.000.000,00

realisasi anggaran Rp. 25.950.000,00 (86,5 %) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 4.050.000,00

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

a. Penyusunan Usulan Program Kerja pengawasan tahunan (UPKPT)

Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan berupa 1 dokumen PKPT tahun 2019 pencapaian 100 %. Anggaran Rp. 9.907.500,00 realisasi anggaran Rp. 9.327.250,00 (94,14 %). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 580.250,00

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengelolaan / pemeliharaan Website

Target Kinerja tersedianya website Inspektorat 1 paket dan capaian kinerja tersedia website Inspektorat 1 paket tercapai 100%. Anggaran Rp. 10.800.000,00 realisasi anggaran Rp 10.636.000,00 (98,48 %). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp. 164.000,00.

B. Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Karanganyar **tidak melaksanakan** Program Kegiatan Urusan Pilihan.

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 angka 11 UU 23/2014). Inspektorat Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

Inspektorat Kabupaten Karanganyar tidak Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB VII

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Tugas Umum Pemerintahan merupakan tugas yang dilakukan di luar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada pasal 6 meliputi:

- a. kerjasama antar daerah;
- b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. pembinaan batas wilayah;
- e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah

Inspektorat Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inspektorat sebagai Unsur Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. Selain tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Karanganyar juga mempunyai fungsi sebagai perencana program pengawasan, perumus kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan asset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan. Juga meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selama Tahun Anggaran 2019 tugas pokok dan fungsi tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang cukup menghambat kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum berjalan secara maksimal;

B. SARAN

Peningkatan pelaksanaan program Inspektorat Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) baik di Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada umumnya;
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi baik di internal Inspektorat Kabupaten Karanganyar, maupun pihak eksternal dengan OPD di Kabupaten Karanganyar serta koordinasi dan konsultasi dengan BPK-RI Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

**INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR**

Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196105041989031006